**Daftar Puskata**

Basrowi, & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Rineka Cipta.

Riyadi, & Bratakusuma, D. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah).* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sonny, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.*Yogyakarta : Graha Ilmu.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

Sumaryadi, I. N. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat.* Jakarta: Citra Utama.

Suwanto, & Donni, J. P. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publikdan Bisnis, cetakan kedua.* Bandung: *Alfabeta*.

Widjaja, Prof. Drs, H. 2005. *penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2014.* Bandung: PT. Raja grafindo persada.

Wilson, T. 1996. *The Empowerment Manual.* London: Gower.

Akmaliyah, M. 2013. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol 53.

Apriyanto, C., Hermini, & Sulistiowati. (n.d.). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemberdayaan Petani Bawang Merah..

Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat(Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011). http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.pdf

Dimas Prayoga. 2017. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kota Pontianak).

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. 2015. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi*. Vol 4*.*

Soeprapto, H. R. R. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Government. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.

Sorni, P. D. 2012. EKSISTENSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat*.

Sutjiatmi, S., & Zainudin, A. 2020. Diktat Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan. 1–84. http://repository.upstegal.ac.id/2967/1/DIKTAT Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan.pdf

Yusdiyanto. 2015. Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 No. 2. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.325

<https://www.brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah> di ambil pada tanggal 18 juli 2022

**Lampiran 1. PEDOMAN PROSEDUR WAWANCARA DAN KUESIONER**

**A. Pengantar Wawancara dan Kuesioner**

1. Memberi salam dan mengucapkan terimakasih kepada responden karena telah bersedia meluangkan waktu yang ada dan memberikasn informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal institusi (universitas).
3. Menginformasikan bahwa wawancara dan kuesioner berlangsung singkat kurang lebih 15 menit.
4. Menjelaskan tujuan wawancara dan kuesioner.

**B. Tujuan Wawancara dan Kuesioner**

Tujuan adanya wawancara dan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai data penelitian skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Brebes”.

**C. Prosedur Wawancara dan kuesioner**

1. Meminta ijin kepada responden untuk melakukan wawancara dan pengambilan data melalui keusioner.
2. Meminta responden untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif.
3. Menjelaskan bahwa wawancara direkam dengan menggunakan recorder.
4. Menjelaskan bahwa hasil wawancara dan kuesioner hanya untuk penelitian.

**D. Kesimpulan dan Penutup Wawancara dan Kuesioner**

1. Pewawancara membuat rangkuman hasil wawancara dan mengolah data.
2. Menanyakan kepada responden apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk ditambahkan.
3. Mengucapkan salam dan terimakasih kepada responden atas informasi yang diberikan dan meminta maaf jika ada kesalahan.

**Lampiran 2.**

**Daftar Pertanyaan Wawancara Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Brebes.**

1. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana peranan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini?
2. Kendala apa saja yang bapak/ibu/saudara/i ketahui selama proses pemberdayaan yang dilaukan pemerintah daerah?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/i apa solusi yang diperlukan untuk bahan evaluasi proses pemberdayaan dari pemerintah daerah?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/i kebijakan UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sudah cukup untuk mengatur keberadaan LSM?
5. Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah pemerintah telah memberikan program penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga swadaya masyarakat?
6. Jika iya, Bentuk apa saja yang dilakukan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas kelembagaan?
7. Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah pemerintah daerah sudah memberikan peningkatan kualitas SDM dari LSM?
8. Jika iya, bentuk apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut?

**Lampiran 3.**

**Daftar Pertanyaan wawancara Pemerintah Daerah Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Brebes.**

1. Menurut bapak/ibu/saudara/i Apa yang menjadi kendala kesbangpol dalam proses pemberdayaan LSM?
2. Bentuk pemberdayaan apa saja yang dilakukan kesbangpol terhadap LSM di kabupaten brebes?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana kondisi LSM di kabupaten Brebes?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana kualitas LSM yang ada di kabupaten Brebes?

**Lampiran 4.**

**Daftar Pertanyaan Kuesioner Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Brebes.**

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Brebes.**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah sangat membutuhkan informasi terkait peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kepuasan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di kabupaten Brebes. Survei ini menanyakan pendapat mengenai pengalaman dalam proses pemberdayaan oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan embaga Swadaya Msyarakat di Kabupaten Brebes”.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terimakasih.

 **PERHATIAN 1.**

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai proses pemberdayaan LSM oleh Pemerintah Daerah.

2. Nilai yang diberikan oleh responden diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil survei iniakan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap proses Pemberdayaan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, LSM maupun masyarakat.

4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

6. Keterangan :

**S** = Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**M =** Mengetahui

**TM =** Tidak Mengetahui

**C =** Cukup

**TC =** Tidak Cukup

**I. Data Responden Nama Responden :**

1. Nama :
2. Nama LSM :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan di lembaga :
5. Tanggal Pengisian :

**II. Pendapat Responden**

Berilah tanda ceklist (✓) dibawah ini yang menurut anda sesuai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Ket** |
| Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Lembaga Swadaya Msyarakat menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016 | Fasilitas Kebijakan | Apakah anda mengetahui Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat? | **M** |  |  |
| **TM** |  |  |
| Fasilitas kebijakan berupa UU No. 17 Tahun 2013 sudah cukup untuk menjadi landasan hukum bagi LSM. | **C** |  |  |
| **TC** |  |  |
| Penguatan Kapasitas Kelembagaan | Pemerintah daerah telah memberikan program ppenguatan Kapsitas Kelembagaan terhadap LSM di Kabupaten Brebes. | **S** |  |  |
| **TS** |  |  |
| Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemerintah daerah memberikan pengetahuan terkait kapasitas, sikap, potensi serta keterampilan yang dimiliki oleh LSM anda. | **S** |  |  |
| **TS** |  |  |
| Pembinaan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan Kualitas Individu. | **S** |  |  |
| **TS** |  |  |